

MAKALAH STRATEGI

REKOMENDASI KEBIJAKAN DAN RENCANA STRATEGIS PANGAN KOTA MEDAN



Penyusun:

1. Dr. Ir. Erika Pardede, M. App.Sc
2. Prof. Dr. Ir. Elisa Yulianti, M.Si
3. Fariz Hutagalung
4. King Ronald Silalahi
5. Ramida Katharina Sinaga
6. Alan Nuary
7. Siti Suci Larasati

Medan, Februari 2022

Laporan ini diproduksi dengan dukungan keuangan dari Uni Eropa. Isi dari laporan ini sepenuhnya adalah tanggung jawab penulis dan tidak mencerminkan pandangan dari Uni Eropa

KATA PENGANTAR

Sustainable Food (Pangan Berkelanjutan) adalah salah satu area program tematik Yayasan Hivos yang bertujuan untuk menyediakan akses pangan yang memadai, terjangkau, dan sehat bagi semua orang, termasuk bagi konsumen berpenghasilan rendah, serta dapat menciptakan peluang ekonomi yang substansial dan memberikan dampak positif bagi lingkungan. Area tematik ini berkontribusi pada pencapaian target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), terutama Tujuan 2 (tanpa kelaparan) dan Tujuan 12 (konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab).

Dalam konteks kota, ketersediaan pangan perkotaan yang terjangkau dipengaruhi oleh berbagai komponen rantai pasok pangan yang panjang dan satu sama lain saling berkaitan. Sistem pangan perkotaan melibatkan banyak pelaku dan kegiatan mulai proses produksi sampai konsumsi yang dilaksanakan dari wilayah perdesaan, pinggiran kota dan perkotaan. Oleh karena itu dibutuhkan koordinasi dan kerjasama yang baik antar pelaku dan pemangku kepentingan pangan untuk menjamin ketahanan pangan kota disertai berbagai upaya dan inovasi untuk menjaga agar ketersediaan pangan tetap stabil dan dapat memenuhi kebutuhan gizi masyarakat.

Atas nama Yayasan Hivos, merupakan suatu kehormatan bagi saya dapat memberikan kata pengantar untuk Makalah Strategi yang berisikan rekomendasi kebijakan dan rencana strategis pangan Kota Medan. Makalah strategi ini merupakan hasil lokakarya dan diskusi terfokus dengan pemangku kepentingan kunci dalam sistem pangan Kota Medan.

Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Uni Eropa atas dukungannya melalui program SWITCH Asia, kepada Dinas Ketahanan Pangan Kota Medan, Perkumpulan Sada Ahmo, serta pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan makalah strategi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Kami berharap makalah strategi ini dapat digunakan sebagai salah satu referensi untuk mengembangkan rencana dan kebijakan yang terkait dengan sistem pangan di Indonesia, dan platform pemangku kepentingan sistem pangan dapat diwujudkan sebagai media untuk berbagi pengalaman dan praktik terbaik, meningkatkan kerjasama untuk mendapatkan solusi, dan meningkatkan efektivitas kegiatan untuk mencapai sistem pangan berkelanjutan di Kota Medan

Februari 2022

Miranda

Project Manager Local Harvest – Yayasan Hivos

RINGKASAN

Kota Medan, kota yang berpenduduk sebesar 2.279.894 jiwa (tahun 2021), terus berusaha mencapai ketahanan pangan yang lebih baik. Dengan laju pertumbuhan penduduk yang relative tinggi, sementara lahan pertanian produktif semakin berkurang, pemerintah terus berinovasi untuk memastikan setiap individu mendapatkan makanan yang cukup, aman untuk mendukung kehidupan yang aktif dan produktif.

Untuk mendukung ketahanan kota Medan, pemerintah Kota dengan didukung oleh Dewan Ketahanan Pangan Kota Medan, telah melakukan banyak terobosan hingga ketersediaan pangan meningkat dari tahun ke tahun baik dari produksi lokal maupun impor, disamping program subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah (Raskin). Disamping itu terdapat peraturan Walikota untuk percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal serta tersedianya informasi pasokan dan harga (SIKAP: Sistem Informasi Ketahanan Pangan), jaminan produk halal dan higienis, serta pembentukan unit Pelaksana Teknis Laboratorium Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan. Program dan usaha tersebut harus didukung dan dilanjutkan untuk pencapaian ketahanan pangan.

Untuk mengkaji lebih jauh kondisi ketahanan pangan saat ini, Hivos melalui proyek SWITCH Asia Local Harvest yang didukung oleh Uni Eropa, Sada Ahmo, Dinas Ketahanan Pangan Kota Medan bekerjasama dengan Lembaga Pendidikan, serta pemangku kepentingan pangan lainnya melakukan serangkaian lokakarya dan menghasilkan 13 rekomendasi serta rencana strategi yang dianggap menjadi prioritas.

Masalah ketahanan pangan masih merupakan hal yang berkelanjutan, dukungan terhadap pemerintahan harus tetap diberikan oleh semua pihak. Kerjasama antar lembaga pemerintahan dan pihak swasta maupun lembaga-lembaga swadaya masyarakat harus dibangun. Untuk itu sebuah inisiasi direkomendasikan yakni adanya Forum Kemitraan Multipihak Pangan Berkelanjutan (FKMPB) Kota Medan.

REKOMENDASI KEBIJAKAN DAN RENCANA STRATEGIS KETAHANAN PANGAN BERKELANJUTAN

Rekomendasi 1: Petakan dan berdayakan semua sumberdaya pertanian secara optimal, termasuk pemanfaatan lahan-lahan tidak produktif, pekarangan dan pertanian kota. Lakukan penyuluhan serta pendampingan pemanfaatan lahan pekarangan, bertanam dalam pot, untuk hidrophonik mendukung penyediaan pangan rumah tangga maupun untuk menaikkan pendapatan. Galakkan pertanian organik melalui penyuluhan dan pendampingan; bagi yang membutuhkan berikan pendampingan proses sertifikasi. Dukung pendampingan untuk penjaminan mutu pangan segar asal tumbuhan (PSAT). Dukung pemberdayaan sumberdaya pertanian dengan pemberian bantuan sarana produksi pertanian dan alih teknologi.

Rekomendasi 2: Lakukan promosi pangan lokal untuk menggali potensi pangan lokal sekaligus mengurangi ketergantungan pada pangan impor. Lakukan penyuluhan dan pendampingan produksi pangan olahan lokal yang sehat, bermutu, bervariasi dan menarik; termasuk penyuluhan tentang pedoman praktik yang baik (GHP, GMP dan GRP) bagi pelaku industri pengolahan pangan. Dukung promosi pangan lokal dengan mendirikan gerai-gerai khusus untuk pangan olahan lokal, serta kerjasama restoran dan hotel.

Rekomendasi 3: Lakukan dukungan bagi kelompok masyarakat miskin dan rawan pangan melalui penciptaan lapangan pekerjaan, program pemberdayaan, dan pemberian bantuan sosial. Lakukan pemuktahiran DTKS dan pendataan rumah tangga miskin secara partisipatif, evaluasi efektivitas bantuan pangan di Kota Medan, dan distribusi bantuan pangan segar bergizi melalui “fresh food voucher” yang melibatkan pedagang pasar tradisional.

Rekomendasi 4: Wujudkan penjaminan harga pangan terjangkau melalui peningkatan koordinasi multi aktor sektor termasuk kerjasama dengan daerah penyangga pangan (*hinterland*) terkait informasi ketersediaan dan distribusi. Lakukan pengendalian harga pangan dan operasi pasar.

Rekomendasi 5: Dukung pendistribusian pangan melalui perbaikan sarana dan prasarana distribusi pangan.

Rekomendasi 6: Dukung Wisata Kuliner yang telah ada, serta bangun jaringan kerjasama antara petani urban farming dengan pelaku pusat Wisata Kuliner.

Rekomendasi 7: Lakukan promosi pentingnya konsumsi Pangan B2SA untuk semua masyarakat, baik produsen, retailer, pelaku industri serta konsumen. Lakukan penyuluhan khusus tentang keamanan

pangan terhadap pelaku industri di pusat jajanan, jajanan pinggir jalan, serta penyedia jajanan anak/siswa sekolah (kantin sekolah); serta lakukan pengawasan berkala tentang keamanan pangan (penggunaan BTP, penerapan GHP).

Rekomendasi 8: Dukung penurunan Prevalensi Stunting melalui penyuluhan kepada IRT, calon pengantin, remaja; serta mengefektifkan intervensi gizi khusus ibu hamil, ibu menyusui, dan baduta.

Rekomendasi 9: Lakukan kampanye penyadaran tentang bahaya kegemukan dan obesitas, melalui media dan penyuluhan langsung. Lakukan pendataan tentang angka kegemukan dan obesitas.

Rekomendasi 10: Lakukan kampanye pengurangan pangan terbuang dan pemanfaatan pangan tersisa (FLW) dengan melakukan penyuluhan kepada masyarakat serta industri. Dorong pembuatan regulasi kerjasama industri makanan dengan Bank makanan (*food bank*), serta penyediaan sarana pendukung.

Rekomendasi 11: Lanjutkan kampanye Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) melalui penyuluhan tentang pentingnya air (minum) bersih, sanitasi dan praktek higienis (IRT, kelompok PKK, siswa), gerakan kebersihan lingkungan (kelurahan), penyediaan sarana cuci tangan di tempat umum.

Rekomendasi 12: Kampanye disertai pemberian insentif perlu dilakukan untuk menumbuhkembangkan industri pangan proses produksinya mengutamakan upaya efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya secara berkelanjutan.

Rekomendasi 13: Dukung penguatan kelembagaan terkait pangan, baik lembaga pemerintah dan swasta.

Tabel 1: Ringkasan Tujuan, Program dan Kegiatan Terkait Pemanfaatan Pangan

Tujuan	Program	Kegiatan
Peningkatan produksi pangan segar	Peningkatan ketrampilan masyarakat dalam memproduksi pangan.	Identifikasi kelurahan layak bertani (organik) di lahan pekarangan.
		Penyuluhan dan pelatihan pemanfaatan lahan pekarangan.
		Penyuluhan dan pelatihan bertani secara hidroponik.
		Penyuluhan dan pelatihan tentang pertanian organik
		Pendampingan sertifikasi organik.

		Pemberian bantuan sarana produksi dan alih teknologi.
	Promosi pertanian perkotaan (<i>urban farming</i>)	Penyuluhan dan pelatihan urban farming di tingkat rumah tangga.
	Penerapan penjaminan mutu/sertifikasi PSAT (petani di kota Medan)	Penyuluhan penjaminan mutu PSAT (petani di kota Medan)
		Pendampingan proses pendaftaran dan sertifikasi PSAT
		Mengefektifkan pengawasan post market PSAT
Meningkatkan promosi pangan lokal Kota Medan	Produksi pangan lokal higienis, sehat, bervariasi, menarik (milenial).	Pendampingan produksi pangan olahan menarik dan variatif.
		Pembinaan produsen pangan olahan lokal dalam memproduksi pangan lokal secara bersih dan sehat.
		Penyuluhan tentang GHP, GMP dan GRP
	Promosi pangan lokal lewat gerai khusus, restoran dan hotel	Pembuatan gerai khusus penjualan pangan olahan lokal.
		Mewujudkan kerjasama UMKM produsen pangan lokal dengan restoran dan hotel.
	Agrowisata pangan	Memperluas ruang terbuka hijau sebagai paru-paru kota dan taman rekreasi dengan tanaman sumber pangan sebagai tanaman utama (pohon buah, sayuran hijau), Medan vertical farming.
		Pengolahan paska panen sebagai bagian dari wisata (kopi cacao)
		Dukungan kepada UMKM pengelola taman rekreasi dipadu dengan wisata kuliner.
Berkurangnya jumlah masyarakat miskin dan rawan pangan	Peningkatan perluasan bantuan pangan yang bersumber dari APBD.	Evaluasi efektivitas bantuan pangan di Kota Medan.
		Pemuktahiran DTKS dan pendataan rumah tangga miskin secara partisipatif.
		Distribusi bantuan pangan segar bergizi melalui “fresh food voucher” yang melibatkan pedagang pasar tradisional.

	Menyelenggarakan pemberdayaan ekonomi dan sosial bagi rumah tangga miskin di daerah rawan pangan.	Asesmen & baseline data rumah tangga rawan pangan.
		Menyiapkan skema pendanaan swakelola type III untuk mendukung OMS melaksanakan program pemberdayaan rumah tangga rawan pangan.
		Menyelenggarakan koordinasi lintas sektor untuk penguatan program pemberdayaan rumah tangga rawan pangan
Adanya jaminan harga pangan terjangkau	Pengendalian harga pangan	Koordinasi multi aktor sektor pangan untuk informasi ketersediaan dan pengawasan distribusi pangan.
		Mengembangkan kerjasama dengan daerah penyangga pangan (hinterland) untuk memastikan sistem informasi produksi dan distribusi pangan
		Operasi pasar.
Tercukupinya sarana infrastruktur dan prasarana distribusi	Peningkatan sarana prasarana distribusi pangan	Perbaikan infrastruktur jalan yang menghubungkan kota Medan dengan daerah-daerah pemasok pangan ke Kota Medan.
		Penyediaan fasilitas <i>cold storage</i> untuk menyimpan produk hasil pertanian yang bersifat musiman, sehingga dapat tersedia sepanjang waktu dan dapat mengendalikan harga produk pangan di pasar.
Berkembangnya wisata kuliner	Pemberdayaan usaha kecil mikro pangan lokal	Mengintegrasikan pemasaran produk urban farming dengan industri kuliner Kota Medan
		Penyediaan sarana, pinjaman lunak dan pelatihan kewirausahaan bidang kuliner bagi pelaku usaha kecil mikro.
		Mengembangkan aplikasi e-market wisata kuliner
Masyarakat mengkonsumsi makanan B2SA	Promosi tentang makanan B2SA	Penyuluhan tentang makanan B2SA bagi masyarakat umum (lewat

	Pengawasan mutu dan keamanan pangan	kelompok PKK, perkumpulan IRT, kelompok perempuan, siswa sekolah)
		Penyuluhan tentang GHP bagi pelaku kuliner (pusat jajanan dan jajanan pinggir jalan)
		Penyuluhan tentang GHP bagi pelaku penyedia jajanan anak (kantin sekolah)
		Penyuluhan tentang bahan tambahan pangan berbahaya bagi pelaku penyedia jajanan anak (kantin sekolah)
		Pengujian/sampling berkala keamanan pangan yang beredar (pusat kuliner, pasar, kantin sekolah).
		Pengawasan pengolahan pangan (pusat kuliner, UMKM, Industri-RT)
Turunnya angka stunting	Kampanye tentang stunting	Penyuluhan tentang stunting (ibu usia produktif (reproduksi), calon pengantin)
	Intervensi gizi (melalui program PKK dan Dinas Kesehatan kepada ibu hamil dan baduta)	Pemberian makanan dan vitamin pendukung kehamilan
		Pemberian PASI, vitamin untuk anak baduta
Masyarakat sadar bahaya kegemukan dan obesitas	Promosi tentang obesitas itu tak sehat	Pemetaan angka kegemukan/obesitas serta pola makan
		Penyuluhan tentang obesitas (anak, remaja, IRT).
Berkurangnya Pangan Terbuang dan Pemanfaatan Pangan Tersisa	Kajian dan pendataan FLW	Pendataan FLW terintegrasi dengan survei berkala BPS.
	Edukasi perilaku terhadap pangan	Edukasi mengenai Food Loss and Waste untuk pelaku bisnis pangan dan masyarakat.
	Pemanfaatan FLW	Pengembangan platform dalam penyaluran pangan berlebih.
	Regulasi dan Pendanaan	Pelatihan pembuatan kompos
Kampanye Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	Promosi WASH	Kebijakan pemerintah daerah untuk menguatkan koordinasi lembaga seperti bank makanan (<i>food bank</i>)
		Penyuluhan tentang pentingnya air (minum) bersih, sanitasi dan praktek higienis (IRT, kelompok PKK, siswa).
		Wajib Gerakan Cuci Tangan

		Penyediaan sarana cuci tangan dan toilet higienis di tempat umum
		Gerakan bersih lingkungan (kelurahan)
Kerjasama antar Lembaga dan semua pihak pemangku kepentingan	Penguatan kelembagaan	

B A B I

P E N D A H U L U A N

1.1 Latar belakang

Pangan merupakan salah satu hak dasar manusia (basic human right) yang menentukan kualitas hidup suatu bangsa. Salah satu urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar adalah pangan. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 menyatakan bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin di dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa Daerah Kabupaten/Kota selain berstatus sebagai daerah juga merupakan wilayah administratif yang menjadi wilayah kerja bagi bupati/wali kota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah daerah kabupaten/kota.

Kemudian pada PP Nomor 17 Tahun 2015 diperkuat bahwa ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat, untuk mewujudkan status gizi yang baik agar dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan.

Demikian juga dengan Pemerintah Kota Medan. Pangan menjadi salah satu fokus pembangunan pemerintah daerah. Salah satu misi Wali Kota Medan yang disebut dengan Medan Inovatif : Mewujudkan kota Medan sebagai kota ekonomi kreatif dan inovatif berbasis penguatan human capital, teknologi digital dan sosial budaya, dengan kegiatan kunci yang dilakukan diantaranya adalah Kolaborasi Sistem Ketahanan pangan Kota Medan dan Pemanfaatan gedung bertingkat untuk ketahanan pangan. Dan dalam misi lainnya, yakni MEDAN BERIDENDITAS, dicapai dengan Mewujudkan kota Medan yang beradab, santun, harmonis, toleran dalam kemajemukan demokratis dan cinta tanah air, dengan salah satu kegiatan kunci adalah: menjadikan Medan menjadi pusat kuliner Asia Tenggara.

Pelaksanaan misi dilakukan dengan pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan usaha ekonomi produktif yang melibatkan kelompok tani, kelompok wanita tani dan kelompok masyarakat lainnya, kemudahan akses permodalan, dukungan teknologi dan informasi, jaminan ketahanan pangan, kemandirian energi, peningkatan kesejahteraan pekerja, mewujudkan keadilan gender dan

perlindungan anak, perluasan akses dan kualitas pelayanan dasar, penciptaan dan perluasan lapangan kerja, peningkatan produktivitas industri dan nilai investasi yang didukung reformasi agraria.

Melalui rangkaian kegiatan yang dilakukan mulai dari pemetaan terkait para pihak dalam system pangan berkelanjutan Kota Medan, Lokakarya Urgensi Forum Multistakeholder Sistem Pangan Berkelanjutan Kota Medan dan Diskusi Terfokus untuk rumusan tujuan dan hasil yang ingin dicapai, ditemukan dan disepakati masalah-masalah terkait pangan yang menjadi perhatian FMS Kota Medan. Ketersediaan pangan, inflasi harga pangan yang sangat mempengaruhi dinamika kehidupan masyarakat, dan perilaku konsumsi pangan yang tidak memperhatikan unsur kesehatan serta kurang menghargai pangan lokal, serta banyaknya limbah makanan yang mengganggu kebersihan Kota Medan fokus perhatian FMS.

1.2 Profil Kota Medan

Kota Medan yang terletak pada posisi 3°30' - 3°43' Lintang Utara dan 98°35' - 98°44' Bujur Timur secara administratif, berbatasan dengan Kabupaten Deli Serdang pada bagian selatan, timur dan barat. Sementara bagian utara berbatasan dengan Selat Malaka. Posisi ini dapat dikatakan strategis mengingat Selat Malaka merupakan salah satu jalur lalu lintas laut terpadat di dunia dan Kota Medan dapat menjadi gerbang kegiatan perdagangan barang dan jasa, baik perdagangan domestik maupun luar negeri. Keberadaan Kota Medan juga cukup strategis karena berdekatan dan mempunyai aksesibilitas transportasi yang baik dengan kota – kota besar dalam di luar negeri seperti Malaysia, Singapura dan Thailand. Selain itu, Kota Medan berbatasan langsung dengan Kabupaten Deli Serdang merupakan salah satu daerah yang kaya dengan Sumber Daya Alam (SDA). Potensi ini menjadikan Kota Medan dapat mengoptimalkan fungsinya sebagai pusat distribusi ekonomi baik dalam skala regional maupun nasional.

Kota Medan merupakan salah satu dari Pemerintahan Kabupaten/ Kota di Sumatera Utara yang terdiri dari 21 kecamatan dan 151 kelurahan. Luas wilayah Kota Medan adalah sebesar 26.510 Ha. Luas wilayah Kota Medan ini relatif kecil jika dibandingkan dengan jumlah penduduk yang ada. Bentuk wilayah administratif Kota Medan yang sangat ramping di tengah menyebabkan terhambatnya pengembangan perkotaan dan penyediaan sarana prasarana kota.

Jumlah penduduk Kota Medan mengalami rata-rata peningkatan sebesar 0.27 persen periode 2016-2020, peningkatan ini berdampak pada kepadatan penduduk disebabkan luas wilayah Kota Medan tidak mengalami perubahan yakni sebesar 265.1 Km² sampai tahun 2020. Peningkatan jumlah penduduk kota disebabkan adanya peningkatan fertilitas (pertumbuhan penduduk alami), mengakibatkan Laju pertumbuhan penduduk (LPP) Kota Medan juga mengalami peningkatan.

Walaupun demikian, dengan jumlah penduduk yang masih relatif besar yang mencapai 2.524.341 jiwa pada tahun 2020, maka secara demografis Kota Medan masih memiliki pangsa pasar barang dan jasa yang relatif besar sehingga menjadi daya tarik (full factors) untuk mencari pekerjaan.

Tingkat kepadatan penduduk Kota Medan terus bertambah sejalan dengan laju pertumbuhan penduduk dengan luas lahan secara administrasi wilayah tidak bertambah. Tingkat kepadatan tertinggi pada tahun 2020 berada di Kecamatan Medan Perjuangan sebesar 27.015 jiwa/ha, diikuti oleh Kecamatan Medan Area sebesar 21.919 jiwa/ha dan Kecamatan Medan Denai sebesar 19.520 jiwa/ha. Selain itu dari gambaran pada tabel di bawah ini, terlihat tingkat kepadatan penduduk di Kota Medan tidak merata seperti yang sudah diuraikan di atas.

Untuk itu Kota Medan sebaiknya sudah harus mendorong perkembangan kawasan perkotaan ke arah utara, karena selain masih punya banyak lahan kosong juga dimaksudkan untuk mengurangi beban kawasan pusat kota dan menambah pusat pertumbuhan ekonomi baru.

Tabel : Kepadatan Penduduk Kota Medan Tahun 2020

No	Kecamatan	Luas (ha)	Jumlah Penduduk (jiwa)		Kepadatan penduduk(jiwa/ha)
			Laki 2	Perempuan	
1	Medan Tuntungan	2,068	47.704	48.876	4,670
2	Medan Johor	1,458	78.344	78.588	10,764
3	Medan Amplas	1,119	67.102	67.492	12,028
4	Medan Denai	905	88.890	87.764	19,520
5	Medan Area	552	59.860	60.732	21,919
6	Medan Kota	584	43.899	46.253	15,437
7	Medan Maimun	298	25.573	26.363	17,428
8	Medan Polonia	901	30.677	30.903	6,835
9	Medan Baru	584	17.915	19.477	6,403
10	Medan Selayang	1,281	53.779	54.454	8,449
11	Medan Sunggal	1,544	67.077	68.082	8,754
12	Medan Helvetia	1,316	84.764	86.223	12,993
13	Medan Petisah	533	36.245	38.673	14,056
14	Medan Barat	682	46.472	47.641	13,800
15	Medan Timur	776	60.338	62.613	15,844
16	Medan Perjuangan	409	54.421	56.072	27,015
17	Medan Tembung	799	77.174	77.750	19,390
18	Medan Deli	2,084	97.058	94.066	9,171

19	Medan Labuhan	3,667	69.544	67738	3,744
20	Medan Marelan	2,382	93.643	90.683	7,738 21
21	Medan Belawan	2,625	58.036	55.383	4,321
	Total	26,567	1.258.515	1.265.826	260,279
			2.524.341		

IPM merupakan indikator yang digunakan untuk melihat perkembangan pembangunan dalam jangka panjang. Untuk melihat kemajuan pembangunan manusia, terdapat dua aspek yang perlu diperhatikan, yaitu kecepatan dan status pencapaian. Secara umum, pembangunan manusia Kota Medan terus mengalami kemajuan selama periode 2016 hingga 2020. IPM Kota Medan meningkat dari 79,34 pada tahun 2016 menjadi 80,98 pada tahun 2020. Selama periode tersebut, IPM Kota Medan rata-rata tumbuh sebesar 0,54 persen per tahun. Pada periode 2019-2020, IPM Kota Medan tumbuh 0,01 persen atau meningkat 0,01 poin. Peningkatan pada periode tersebut adalah lompatan tertinggi selama periode 2015-2020.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan pembuatan makalah ini adalah untuk memberikan gambaran kondisi sistem pangan berkelanjutan Kota Medan dan sebagai landasan bagi Forum Multistakeholder yang akan dibentuk.

BAB II SITUASI KETAHANAN PANGAN KOTA MEDAN

2.1 Status ketahanan pangan

UU No. 18/2012 tentang Pangan menjelaskan bahwa ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

Definisi dan paradigma ketahanan pangan terus mengalami perkembangan sejak adanya Conference of Food and Agriculture tahun 1943 yang mencanangkan konsep *secure, adequate and suitable supply of food for everyond*. Definisi ketahanan pangan sangat bervariasi, namun umumnya mengacu definisi dari Bank Dunia (1986) dan Maxwell dan Frankenberger (1992) yakni “akses semua orang setiap saat pada pangan yang cukup untuk hidup sehat (*secure access at all times to sufficient food for a healthy life*).

Studi pustaka yang dilakukan oleh IFPRI (1999) diperkirakan terdapat 200 definisi dan 450 indikator tentang ketahanan pangan (Weingartner, 2000). Berikut disajikan beberapa definisi ketahanan yang sering diacu:

1. Undang-Undang Pangan No.7 Tahun 1996: kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan secara cukup, baik dari jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau.
2. USAID (1992: kondisi ketika semua orang pada setiap saat mempunyai akses secara fisik dan ekonomi untuk memperoleh kebutuhan konsumsinya untuk hidup sehat dan produktif.
3. FAO (1997) : situasi di mana semua rumah tangga mempunyai akses baik fisik maupun ekonomi untuk memperoleh pangan bagi seluruh anggota keluarganya, dimana rumah tangga tidak beresiko mengalami kehilangan kedua akses tersebut.
4. FIVIMS 2005: kondisi ketika semua orang pada segala waktu secara fisik, sosial dan ekonomi memiliki akses pada pangan yang cukup, aman dan bergizi untuk pemenuhan kebutuhan konsumsi dan sesuai dengan seleranya (*food preferences*) demi kehidupan yang aktif dan sehat.
5. Mercy Corps (2007) : keadaan ketika semua orang pada setiap saat mempunyai akses fisik, sosial, dan ekonomi terhadap kecukupan pangan, aman dan bergizi untuk kebutuhan gizi sesuai dengan seleranya untuk hidup produktif dan sehat.

Berdasarkan definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa ketahanan pangan memiliki 5 unsur yang harus dipenuhi:

1. Berorientasi pada rumah tangga dan individu
2. Dimensi waktu setiap saat pangan tersedia dan dapat diakses
3. Menekankan pada akses pangan rumah tangga dan individu, baik fisik, ekonomi dan sosial
4. Berorientasi pada pemenuhan gizi
5. Ditujukan untuk hidup sehat dan produktif

Menurut FAO (1997) menyatakan bahwa ketahanan pangan merupakan situasi dimana semua rumah tangga mempunyai akses baik fisik maupun ekonomi untuk memperoleh pangan bagi seluruh anggota keluarganya, dan dimana rumah tangga tidak beresiko untuk mengalami kehilangan kedua akses tersebut. Pencapaian ketahanan pangan di Indonesia terkait dengan salah satu tujuan UUD 1945 dalam alinea keempat yaitu mencapai kesejahteraan umum. Hal tersebut berarti konsep ketahanan pangan mencakup ketersediaan pangan yang memadai, stabilitas, dan akses terhadap pangan-pangan utama.

2.2 Ketersediaan Pangan Kota Medan.

Ketersediaan pangan merupakan salah satu indikator ketahanan pangan suatu wilayah. Ketahanan pangan dipandang sebagai hal yang sangat penting dalam rangka pembangunan nasional untuk membentuk manusia berkualitas, mandiri dan sejahtera. Untuk mencapai tujuan tersebut perlu diwujudkan ketersediaan pangan yang cukup, aman, bermutu, bergizi dan beragam serta tersebar merata di seluruh wilayah dan terjangkau oleh daya beli masyarakat.

Ketersediaan pangan yang cukup berarti terpenuhinya pangan yang cukup, bukan hanya beras melainkan juga mencakup pangan yang berasal dari tanaman, ternak, dan ikan untuk memenuhi kebutuhan pangan. Ketersediaan pangan dapat dipenuhi dari tiga sumber yaitu: (1) kemampuan produksi dalam negeri; (2) impor pangan; dan (3) pengelolaan cadangan pangan.

Kota Medan memiliki jumlah penduduk terbanyak di Sumatera Utara yaitu sebesar 2.279.894 jiwa. Dengan jumlah penduduk yang semakin meningkat setiap tahunnya maka dapat dipastikan bahwa kebutuhan akan pangan juga akan semakin meningkat, dengan kata lain terjadi peningkatan konsumsi.

Kota Medan bukanlah kota pertanian yang mampu menghasilkan produk pangan dengan jumlah yang besar melihat keterbatasan lahan pertanian yang 22 dimilikinya. Oleh sebab itu, pemenuhan permintaan kebutuhan pangan Kota Medan didominasi oleh impor dari luar Kota Medan.

Capaian Ketersediaan Pangan Kota Medan

Analisis ketersediaan pangan Kota Medan memegang peranan kunci bagi pemerintah dalam rangka pemenuhan konsumsi pangan masyarakat Kota Medan. Dengan analisis ketersediaan pangan ini akan diperoleh gambaran produksi, pengadaan dan penggunaan pangan serta tingkat ketersediaan pangan dan gizi (energi, protein, dan lemak) untuk konsumsi penduduk per kapita. Selanjutnya dinilai apakah ketersediaan pangan yang ada (energi, protein, dan lemak) telah mencukupi, bila dibandingkan dengan Angka Kecukupan Gizi (AKG) yang dianjurkan.

Salah satu cara memperoleh gambaran situasi produksi dan ketersediaan pangan secara lengkap namun sederhana, adalah menggunakan pendekatan Neraca Bahan Makanan (NBM). NBM memberikan informasi tentang ketersediaan bahan pangan untuk setiap komoditas dan olahannya/produk turunannya yang lazim dikonsumsi penduduk berdasarkan sumber penyediaan dan penggunaannya. Pemerintah Kota Medan telah melakukan upaya untuk meningkatkan ketersediaan pangan utama, khususnya beras, II-90 daging, telur, dan ikan.

Untuk ketersediaan pangan cenderung mengalami peningkatan sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 yakni pada tahun 2016 telah mencapai 99.43 persen, tahun 2017 telah mencapai 103.94 persen, tahun 2018 telah mencapai 146.42 persen, tahun 2019 dan tahun 2020 telah mencapai 154 persen.

Tabel berikut menunjukkan Ketersediaan Kelompok Pangan Kota Medan Tahun 2021

Jenis Bahan Makanan Commodity		Ketersediaan Bahan Makanan (Ton)	Ketersediaan Per Kapita	
			Kg/Th	Gram/ hari
I. PADI-PADIAN/CEREALS				
	Padi gagang/gabah	0	0	0
	Gabah/Beras	407.528,1313	167,35	458,48
	Jagung basah/Fresh maize	3002,13	1,23	3,38
	Tepung Gandum/ Wheat flour	6647,6657	2,73	7,48
II. MAKANAN BERPATI/ STARCHY FOOD				
	Ubi jalar/Sweet potatoes	13647,04	5,60	15,35
	Ubi kayu/Cassava	30781,5481	12,64	34,63
	Sagu/Tepung sagu	93,02536	0,04	0,10

III. GULA/SUGAR				
	Gula pasir/Refined sugar	25001	10,27	28,13
	Gula mangkok/Other sugar	635,8	0,26	0,72
IV. BUAH BIJI BERMINYAK				
	Kacang tanah berkulit	3054,25	1,25	3,44
	Kedelai/Soyabeans	18603,5298	7,64	20,93
	Kacang hijau/Mungbean	891,87	0,37	1,00
	Kelapa berkulit/daging	19735,5505	8,10	22,20
V. BUAH-BUAHAN/FRUITS				
	Lainnya/Others *)	290138,6939	119,14	326,41
VI. SAYUR-SAYURAN/ VEGETABLES -				
	Bawang Merah/ Shallot	448,774	0,18	0,50
	Ketimun/Cucumber	2060,1168	0,85	2,32
	Kacang Merah/Kidney beans	548,53656	0,23	0,62
	Kacang Panjang/ String beans	2931,0441	1,20	3,30
	Kentang/Potatoes	11000,6291	4,52	12,38
	Cabe/Chilli	1077,4692	0,44	1,21
	Terong/Eggplant	1264,5225	0,52	1,42
	Kangkung/Swamp cabbage	10343,4804	4,25	11,64
	Bayam/Spinach	5716,8432	2,35	6,43
	Jamur/ Mushroom	6510,608853	2,67	7,32
	Melinjo/ Melinjo	343,6939213	0,14	0,39
	Petai/ Twisted Cluster Bean	17594,71347	7,23	19,79
VII. DAGING/MEAT				
	Daging Sapi/Beef	7962,489125	3,27	8,96
	Daging Kerbau/ Buffalo Meat	0,82078765	0,00	0,00
	Daging Kambing/Mutton	32,21925	0,01	0,04
	Daging Babi/Pork	896,06907	0,37	1,01
	Daging Ayam Buras Daging	234,46	0,10	0,26
	Daging Ayam Ras	33763,38	13,86	37,98
VIII. TELUR/EGGS				
	Telur Ayam Ras/ Improved Hen	40506,4389	16,63	45,57
	Telur Itik/Ducks Eggs	1461,666	0,60	1,64

IX. SUSU/MILK				
	Susu Sapi/Cow Milk	43711,236	17,95	49,18
X. IKAN/FISH				
	Lele/Catfish	13,58	0,01	0,02
	Udang/Shrimps	597,52	0,25	0,67
	Lainnya/Others	267808,27	109,97	301,29
XI. MINYAK & LEMAK				
	Kopra/Minyak goreng	33514,8824	13,76	37,71
	Lemak Sapi/Cattle Fats	11,3	0,00	0,01

Sementara untuk Ketersediaan Bahan Pangan Strategis Kota Medan dalam Tiga Tahun Terakhir (2019 –2021) ditunjukkan dalam table berikut:

No	Bahan Pangan Strategis	Ketersediaan (Ton)		
		2019	2020	2021
1	Beras	331.526	298.238	407.528
2	Jagung	2.605	2.207	3.002
3	Gula Pasir	28.308	19.808	25.001
4	Bawang Merah	9.151	6.960	449
5	Cabe merah	20.352	15.470	1.077
6	Daging Sapi	11.624	10.228	7.962
7	Daging Ayam	18.337	16.503	33.998
8	Telur Ayam Ras	31.288	28.159	40.506
9	Minyak Goreng Sawit	34.497	23.838	33.515

Ketersediaan beras, jagung, gula pasir, daging ayam, telur ayam ras dan minyak goreng sawit mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2020 dan bahan pangan bawang merah, cabe merah dan daging sapi menunjukkan penurunan dari tahun 2020.

Sesuai dengan laporan dari Dinas Ketahanan Pangan, analisis ketersediaan beras di Sumatera Utara terhadap kebutuhan beras Kota Medan Tahun 2016 - 2020 disajikan pada tabel berikut:

No.	Keterangan	Jumlah	Satuan
[1]	[2]	[3]	[4]

1	Konsumsi beras per Kapita (Nasional)	92.9	Kg/Kap/Thn
2	Jumlah Penduduk Kota Medan	2524321	Jiwa
3	Konsumsi beras per tahun di Kota Medan	986.400	Ton
4	Produksi Beras di Kota Medan*	3440.34	Ton
5	Kekurangan beras di Kota Medan	76.552 (surplus)	Ton
6	Konsumsi beras per Kapita di Kota Medan berdasarkan atas produksi beras di Kota Medan	103.7	Kg

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kota Medan

Bantuan beras untuk orang miskin

Memastikan ketersediaan beras sebagai bahan pokok utama adalah sangat penting, khususnya bagi kelompok miskin, yang oleh Pemerintah disebut dengan Raskin. Program Beras Untuk Masyarakat Miskin (Raskin) Program Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Raskin) merupakan subsidi pangan yang diperuntukkan bagi rumah tangga miskin dan rentan sebagai upaya dari pemerintah untuk meningkatkan ketahanan pangan dan memberikan perlindungan sosial pada rumah tangga miskin dan rentan.

Adapun implementasi program pengentasan kemiskinan melalui intervensi program beras untuk masyarakat miskin (Raskin) di Kota Medan tahun 2015– 2019 ditunjukkan pada tabel berikut:

Tahun[1]	Program Raskin	
	Jumlah RTS [2]	Jumlah Beras (ton)/Rp [3]
2015	73.110	1.960.650
2016	73.110	1.960.650 kg
2017	73.110	Rp 106.151.760.000,-
2018	59.403	47.743 KPM
2019	57.553	57.003KPM

Sumber : Sekretariat Daerah Kota Medan.

Selain berfungsi sebagai mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan, Program Raskin bermanfaat bagi:

1. Peningkatan ketahanan pangan di tingkat rumah tangga sasaran, sekaligus mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan,

2. Peningkatan akses pangan baik secara fisik (beras tersedia di TD), maupun ekonomi (harga jual yang terjangkau) kepada RTS,
3. Sebagai pasar bagi hasil usaha tani padi,
4. Stabilisasi harga beras di pasaran,
5. Pengendalian inflasi melalui intervensi Pemerintah dengan menetapkan harga beras bersubsidi sebesar Rp1.600,00/kg, dan menjaga stok pangan nasional,
6. Membantu pertumbuhan ekonomi daerah

Masalah dalam Ketersediaan Pangan Kota Medan

Masalah yang ditemukan terkait ketersediaan pangan kota Medan adalah:

1. Ketersediaan lahan pertanian yang berkurang akibat alih fungsi lahan di Kota Medan.

Mengingat Kota Medan adalah ibu kota Provinsi Sumatera Utara dengan jumlah penduduk yang meningkat setiap tahun sehingga kebutuhan akan lahan pemukiman semakin meluas. Konversi lahan pertanian ke non pertanian pun setiap tahunnya. Hal ini berdampak kepada semakin berkurangnya lahan untuk pertanian. Di samping itu, lahan yang masih ada belum dikelola maksimal dan menjadi lahan yang terlantar.

Sebagian besar dari penggunaan lahan di Kota Medan adalah untuk pemukiman, dengan persentase 51,3 % dari luas total. Penggunaan lainnya yaitu untuk kawasan hijau sebesar 30,9% selebihnya digunakan untuk komersil perumahan dan perguruan tinggi.

Tabel di bawah ini menunjukkan tata guna lahan Kota Medan.

No	Penggunaan Luas	(Ha)	Persentase (%)
1	Pemukiman	14.966,08	51,3
2	Mangrove	1.440,30	4,9
3	Kawasan Padat	9.012,63	30,9
4	Komersil	1.032,58	3,5
5	Perumahan	590,01	2,0
6	Perguruan Tinggi	3,02	0,0001
7	Industri	11,99	0,0004
8	Pelabuhan	235,07	0,8
	Total	29.157,06	100,0

(Sumber: BPS Kota Medan, Medan Dalam Angka)

2. Tingginya tingkat ketergantungan pangan Kota Medan dari wilayah sekitar (hinterland).

Kota Medan yang notabene sangat bergantung kepada kontribusi sentra-sentra produksi pertanian hinterlandnya. Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Karo dan Kabupaten Dairi menjadi penyumbang utama ketersediaan pangan di Kota Medan.

Rasio ketergantungan impor menggambarkan besarnya porsi impor terhadap total pangan yang tersedia, jadi dalam hal ini yang paling besar rasio ketergantungan impornya adalah kelompok bahan makanan padi-padian yakni sebesar 234,44%, kemudian disusul buah/biji berminyak sebesar 212,01%, kelompok buah-buahan sebesar 148,70%, kelompok sayur-sayuran sebesar 137,51%, urutan berikutnya kelompok pangan makanan berpati sebesar 105,31% dan susu sebesar 100,10%. Selain itu ada beberapa kelompok bahan makanan 46 yang rasio ketergantungan impornya masih dibawah 100% yakni antara lain : gula sebesar 99,69%, daging sebesar 90,21%, telur 90,21% dan minyak dan lemak 15,7%.

3. Meningkatnya produk pangan impor ke Kota Medan.

Hal ini menjadi masalah, karena masyarakat lebih mengutamakan produk impor sehingga produk lokal menjadi kurang laku di pasar. Jika ditilik dari kesehatan, produk impor diyakini lebih tidak sehat karena telah mengandung zat-zat kimia untuk memperlama masa bertahan. Seharusnya produk lokal akan lebih sehat karena keterjangkauannya lebih pendek dan masa untuk memperolehnya juga singkat sehingga tidak perlu dibubuhi bahan pengawet.

4. Meningkatnya limbah makanan (food waste) dari proses produksi maupun konsumsi.

Banyaknya restoran, hotel dan bakery di Kota Medan membuat limbah makanan meningkat dan menimbulkan keresahan karena mengganggu kebersihan. Sementara itu, ide untuk mengelola limbah makanan sehingga tidak menjadi sampah mulai berkembang. Inisiasi ini perlu didukung sehingga limbah makanan dapat dimanfaatkan dengan maksimal.

5. Industri pengolahan pangan lokal belum terhubung dengan pangan yang diproduksi.

Inisiatif-inisiatif kecil yang ada di Kota Medan terkait produksi pangan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok swadaya masyarakat, kelompok tani dan perorangan lainnya belum terhubung dengan industry yang membutuhkan bahan pangan. Jika sedang panen raya, kelompok akan kesulitan untuk menjual hasil panen sehingga membuat petani mengalami kerugian.

6. Masih sangat minim petani/produsen pangan yang segar, ramah lingkungan (organic).

Berkaitan dengan nomor 3, meningkatnya ketertarikan akan produk impor menunjukkan masih rendahnya minat akan produk pangan yang organic dan ramah lingkungan. Beberapa produk pangan yang sudah mulai diproduksi secara organic, belum mendapat pasar yang menetap sehingga biaya produksi produk organic masih tinggi. Promosi produk organic masih kurang dan pemerintah belum menjadikan organic sebagai produk unggulan.

7. Perhatian kepada sektor pangan kelautan dan perikanan masih rendah (mangrove, pendampingan nelayan, dan lain-lain).

Daerah di Kota Medan yang berada di sekitar pantai seperti Belawan masih menjadi tantangan dalam pengelolaannya. Banyaknya sampah juga menjadi masalah yang perlu diperhatikan secara serius karena memberi dampak buruk bagi kesehatan masyarakat yang tinggal di sekitar pantai.

2.3 Analisis Kondisi Keterjangkauan Pangan Masyarakat Kota Medan

Dalam penyelenggaraan pangan, aspek “keterjangkauan pangan” sering kali luput dari perhatian pemerintah dan publik. Ketersediaan pangan yang cukup secara makro belum tentu menunjukkan ketahanan pangan di tingkat individu dan keluarga. Akses pangan berhubungan dengan kemampuan rumah tangga untuk memperoleh cukup pangan, baik yang berasal dari produksi sendiri, stok, pembelian, barter, hadiah, pinjaman dan bantuan pangan. Pangan mungkin tersedia secara fisik di suatu daerah, akan tetapi tidak dapat diakses oleh rumah tangga tertentu karena terbatasnya akses fisik, akses ekonomi, dan/atau akses sosial.¹

Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan

Badan Ketahanan Pangan RI menjelaskan bahwa aspek keterjangkauan pangan dipengaruhi oleh faktor stabilitas pasokan dan harga pangan. Sejauh ini ketersediaan pangan bagi masyarakat Kota Medan masih sangat mengandalkan pasokan pangan dari daerah-daerah pertanian dan peternakan (*hinterland*) seperti Kab. Deli Serdang, Langkat dan Kab. Karo. Oleh karena itu penting sekali Pemko Medan menjaga stabilitas pasokan pangan dari luar daerah agar fluktuasi harga pangan dapat terkendali. Pasokan pangan ke Kota Medan dari beberapa sentra produksi pangan sangat dipengaruhi oleh lancarnya jaringan distribusi pengangkutan barang pangan dan produsen hingga sampai ke tangan konsumen.

Jika melihat kondisi panjang jalan wilayah Kota Medan sudah cukup baik yang mencapai 98 % pada tahun 2020 namun kondisi jalan di wilayah Sumatera Utara masih terdapat sekitar 750 km atau

¹ Dalam konsep Peta Ketahanan & Kerentanan Pangan, aspek keterjangkauan pangan diukur menggunakan 3 indikator yaitu (1) Akses ekonomi mencakup kemampuan keuangan untuk membeli pangan yang cukup dan bergizi; (2) Akses fisik mencakup keberadaan infrastruktur untuk mencapai sumber pangan; dan/atau (3) Akses sosial yang mencakup modal sosial yang dapat digunakan untuk mendapatkan dukungan informal dalam mengakses pangan, seperti barter, pinjaman atau program jaring pengaman sosial.

25 % jalan yang rusak dari total 3005 km yang tersebar di 33 Kabupaten/Kota.² Hal ini tentu akan berdampak semakin tingginya biaya transportasi, kerusakan kualitas pangan akibat terlalu lama di perjalanan dan belum lagi adanya pungutan liar selama diperjalanan.

Pemko Medan masih menghadapi tantangan belum optimalnya upaya dalam menstabilkan pasokan bahan pangan pokok sehingga terjadi kenaikan harga bahan pangan pokok terutama pada hari-hari besar keagamaan nasional. Gejolak harga juga dapat dipengaruhi oleh aksi kartel maupun pedagang yang menaikkan harga dengan tidak wajar pada saat tingginya permintaan terhadap komoditi pangan tertentu. BPS RI merilis pada Desember 2021 bahwa harga cabe rawit, telur ayam dan minyak goreng menggerakkan naiknya inflasi Kota Medan. Dengan menggunakan data series 2014-2019, diketahui bahwa harga komoditi pangan yang memiliki pengaruh jangka pendek terhadap inflasi di Kota Medan adalah beras, cabe rawit, dan bawang putih sedangkan dalam jangka panjang adalah cabe merah (Rahmanta & Yusak, 2020).

Kemiskinan Menghambat Akses Terhadap Pangan.

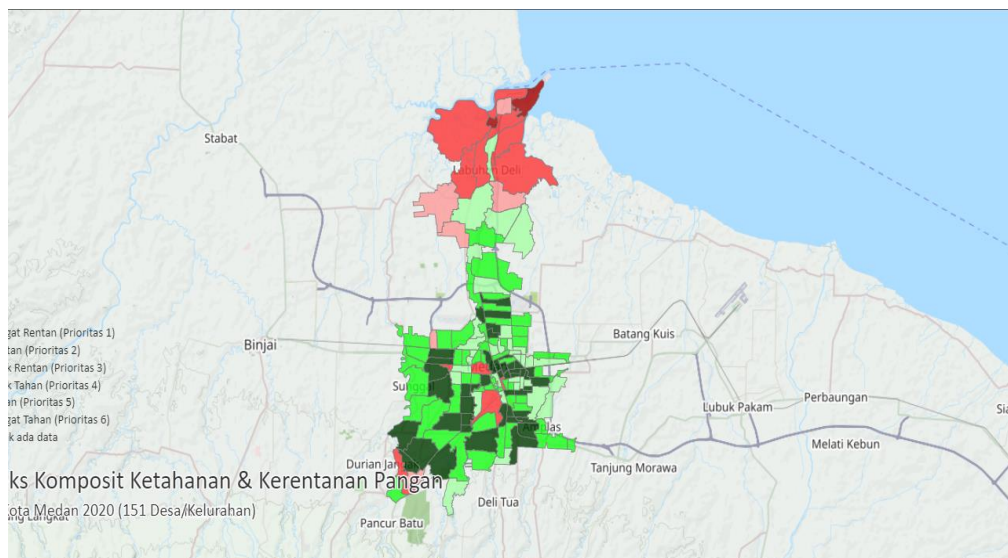
Pada periode tahun 2016 sampai 2018 Pemerintah Kota Medan telah dapat menurunkan jumlah penduduk miskin dari 206.807 jiwa menjadi 186.450 jiwa dan berhasil menurunkannya ke angka 183.540 jiwa pada tahun 2020, dengan catatan angka tersebut disampaikan BPS pada awal bulan Maret 2020 di awal terjadinya Pandemi Covid-19. Secara persentase angka kemiskinan di Kota Medan masih dikategorikan rendah tetapi jika dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin di Sumatera Utara maka jumlah penduduk miskin Kota Medan sangat besar sekitar 14,5 %.

Situasi kemiskinan berkaitan erat dengan kerawanan pangan rumah tangga atau individu. Badan Ketahanan Pangan (2021) menyebutkan bahwa rata-rata pengeluaran rumah tangga untuk pangan relatif besar, misalnya di pedesaan dan perkotaan tahun 2020 mencapai 49 % sedangkan di perkotaan mencapai 46 %. Sementara itu, bagi rumah tangga yang rawan pangan³ mencapai rata-rata 69 % (SMERU, 2021). Padahal harga pangan di Indonesia termasuk salah satu tertinggi di negara-negara Asia sebagaimana yang termuat dalam laporan World Bank tentang Indonesia Economic Prospects, December 2020: Towards a Secure and Fast Recovery. Harga pangan yang tinggi tentu akan mengurangi keterjangkauan masyarakat miskin dalam memperoleh pangan beragam dan bergizi. Keterjangkauan pangan bagi masyarakat miskin terutama perempuan dan orang lanjut usia (lansia) masih dihadapkan dengan isu gender dan rendahnya pemahaman terhadap kebutuhan spesifik reproduksi yang menghambat perempuan dan lansia dalam meningkatkan konsumsi pangan beragam dan bergizi.

² <https://sumut.inews.id/berita/sepanjang-750-km-jalan-provinsi-di-sumut-rusak>

³ Rumah tangga rawan pangan didefinisikan sebagai rumah tangga memiliki asupan kalori kurang dari 80% dari standar nasional (2.150 kkal/kapita/hari) dan menghabiskan lebih dari 60% pengeluaran rumah tangganya untuk makanan (Maxwell et al., 2000).

Badan Ketahanan Pangan telah memetakan daerah di Indonesia yang termasuk daerah rawan pangan untuk dasar mengembangkan prioritas intervensi pangan. Pemetaan menggunakan indikator komposit ketahanan & kerawanan pangan dengan menghitung aspek ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan. Berdasarkan hasil pemetaan bahwa dari 155 kelurahan di kota Medan terdapat 14 kelurahan (2010), 12 kelurahan (2014) dan 21 kelurahan (2020) yang masuk kategori rawan pangan.⁴



Gambar FSVA Tahun 2020 Kota Medan.

2.4 Pemanfaatan/Utility

Sejalan dengan arah kebijakan Badan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian, aspek pemanfaatan pangan dalam konteks kota Medan difokuskan pada: (a) percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya dan kearifan lokal; dan ditunjang dengan (b) pengawasan mutu dan keamanan pangan segar

2.5 Keberlanjutan/Sustainability dan Cross cutting issue

1. Food Loss and Waste (FLW)

Antara tahap panen dan konsumsi, sepertiga dari makanan yang diproduksi untuk digunakan manusia hilang atau terbuang, juga dikenal dengan istilah *food loss and waste* (FLW). FLW menghasilkan sekitar 4,4 giga ton emisi gas rumah kaca per tahun di seluruh dunia. Kini, FLW telah termasuk dalam Sustainable Development Goals (SDGs) sejak tahun 2015 sebagai target 12.3, yang menyatakan, (Pada

⁴ <http://app2.bkp.pertanian.go.id/>

tahun 2030 dapat mengurangi separuh sisa makanan per kapita pada tahap distribusi dan konsumsi, dan mengurangi kehilangan makanan dalam produksi dan sepanjang rantai pasokan, termasuk kerugian pasca panen.” Indonesia telah berkomitmen untuk mengarusutamakan tujuan, target, dan indikator SDGs yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, sebagai salah satu negara yang turut menyepakati agenda pembangunan global.

Menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia (KLHK), sampah makanan menyumbang 44 persen dari timbulan sampah Indonesia pada tahun 2018. Indonesia juga termasuk dalam produsen FLW terbesar kedua di dunia dengan perkiraan produksi tahunan 300 kg per kapita. Sementara pembangunan rendah karbon dan penerapan ekonomi sirkular masih terdengar asing di telinga awam, pada tahun 2021 pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas telah merilis laporan kajian FLW di Indonesia. Kajian ini merupakan langkah awal untuk mengetahui kondisi terkini FLW dan mengidentifikasi kebijakan dan strategi yang harus diadopsi untuk membantu pembangunan rendah karbon dan penerapan ekonomi sirkular.

Berdasarkan temuan-temuan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, timbulan FLW Indonesia pada tahun 2000-2019 sebesar 115-184 kg/kapita/tahun. Dari sisi tahap rantai pasok, timbulan terbesar terjadi di tahap konsumsi. Dari sisi sektor dan jenis pangan, timbulan terbesar terjadi di tanaman pangan kategori padi-padian. Sementara sektor pangan paling tidak efisien yaitu tanaman hortikultura di kategori sayur-sayuran. Diestimasi 1.702,9 Mt CO₂ ek dihasilkan dari total emisi timbulan FLW 2000-2019 dengan rata-rata kontribusi per tahun setara dengan 7,29% emisi GRK di Indonesia. Kerugian yang dihasilkan dari timbulan FLW Indonesia pada tahun 2000-2009 diperkirakan sebesar 213-551 triliun rupiah/tahun/ atau setara dengan 4-5% Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Dari kehilangan kandungan gizi (energi) dari FLW pada tahun 2000-2009 dapat memberi makan 61-125 juta orang atau setara dengan 29-47% populasi Indonesia. Sementara itu di tingkat Kabupaten/Kota, Kota Medan, isu FLW masih sulit diidentifikasi karena masih sedikitnya kajian-kajian komprehensif serupa yang dilakukan. Padahal, isu FLW berkaitan erat dengan situasi ketahanan pangan di daerah tersebut.

2. *Climate Change*

Umumnya, negara-negara yang dilanda kelaparan biasanya juga rentan terhadap perubahan iklim dan memiliki kapasitas terbatas untuk merespons. Perubahan iklim berdampak pada produksi, ketersediaan, akses, kualitas, penggunaan, dan stabilitas sistem pangan. Akibatnya, bencana terkait cuaca ekstrem menjadi lebih sering dan akan menurunkan produksi tanaman. Lebih lanjut, nilai gizi tanaman berkurang ketika kadar CO₂ meningkat. Singkatnya, itu berdampak pada setiap komponen rantai makanan.

Ditilik lebih lanjut, FLW memiliki dampak timbal balik dalam perubahan iklim, ketika FLW itu sendiri turut menyumbang emisi GRK. Sementara di sisi lain, emisi yang dihasilkan dari FLW mendorong krisis iklim yang akan memengaruhi proses produksi pangan. Kondisi seperti ini apabila dipertahankan akan

memperparah situasi ketahanan pangan khususnya kelompok-kelompok marjinal karena tidak hanya masalah akses tetapi produksi juga menjadi ancaman mereka.

Jika perubahan iklim memengaruhi produksi pangan, cukup beralasan untuk berasumsi bahwa itu juga akan memengaruhi akses pangan. Perubahan iklim dan bencana terkait cuaca ekstrim (banjir atau kekeringan) dapat menyebabkan kenaikan harga makanan yang tersedia. Rumah tangga termiskin (masyarakat miskin perkotaan dan pedesaan) adalah yang paling rentan terhadap kenaikan harga tersebut. Karena sistem pangan kita semakin bergantung satu sama lain, kejadian yang lebih sering dan ekstrim di satu lokasi dapat mengganggu kelompok-kelompok di sistem pangan, bahkan sistem pangan global secara keseluruhan. Namun, area yang paling kecil kemungkinannya untuk bereaksi terhadap peristiwa atau perubahan yang tiba-tiba akan terus terpengaruh secara tidak proporsional. Masalah berikutnya di banyak masyarakat rawan pangan adalah gizi. Perubahan iklim, di sisi lain, dapat berdampak negatif pada nilai gizi makanan yang ditanam. Konsentrasi karbon dioksida yang lebih tinggi menurunkan kandungan protein, seng, dan zat besi dari tanaman, menurut beberapa penelitian. Masyarakat yang sangat bergantung pada panen tanaman untuk nutrisi mereka akan terkena dampak terburuk.

Perubahan iklim juga akan memengaruhi pada sektor peternakan dengan menggunakan sumber daya yang sama dengan manusia. Kekeringan juga merupakan ancaman serius bagi peternakan. Begitu juga dengan populasi ikan juga terancam oleh krisis iklim. Sementara peningkatan curah hujan atau banjir tidak selalu berdampak baik bagi hasil pertanian. Peningkatan curah hujan atau banjir dapat menyebabkan pertumbuhan jamur dan hama pada tanaman. Semakin banyak perubahan iklim dan peristiwa cuaca ekstrim yang terjadi, semakin tinggi pula kemungkinan kehilangan makanan setiap tahunnya.

Perubahan iklim berdampak pada rantai pangan global, membuat mereka yang saat ini menderita kelaparan dan kekurangan gizi lebih rentan terhadap bahaya baru tersebut. Untuk mengakhiri kelaparan dan kekurangan gizi dalam perubahan iklim memerlukan intervensi skala besar.

3. WASH (Water Sanitation and Hygiene)

Keterkaitan antara air, ketahanan pangan, dan lingkungan bukanlah hal baru, namun sekarang mendapat perhatian yang meningkat sebagai akibat dari beberapa pemicu yang terjadi akhir-akhir ini. Saat ini diperlukan peningkatan kesadaran akan pentingnya penyediaan air bersih, sanitasi, dan kebersihan (WASH) dalam mencapai gizi yang baik serta mencegah kematian anak akibat stunting. Selain itu, adanya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) mengidentifikasi pentingnya mengakhiri kelaparan dan kekurangan gizi (SDG #2), air bersih, dan sanitasi (SDG #6) untuk kesehatan global.

Tanpa akses ke air minum yang aman, sanitasi yang baik, dan higiene yang baik, makanan mudah terkontaminasi melalui paparan air minum yang tidak aman, serta patogen. Penyakit dapat menular melalui makanan dan minuman yang dikonsumsi. Penyakit yang menular akibat memakan makanan sering disebut sebagai foodborne disease atau biasa dikenal dengan keracunan makanan. Hal ini dapat

menyebabkan diare, dan penyakit usus lainnya akibatnya terjadi kurang gizi. Lalu, kerugian dari penyakit bawaan makanan sangat kompleks dan mencakup penurunan kemampuan tubuh untuk menyerap nutrisi dari makanan, sehingga meningkatkan risiko kekurangan gizi, dan jika penyakit bawaan makanan ini tidak ditangani dengan tepat, hilangnya produktivitas, penyakit, dan bahkan kematian dapat terjadi.

Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) adalah salah kampanye dasar dalam Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) untuk mengurangi risiko penyakit diare. Dipercaya praktik CTPS yang dimulai sejadi dini seperti sebelum menyiapkan makanan ditambah dengan menggunakan air bersih untuk mencuci peralatan makan dan menyiapkan makanan, serta mengkonsumsi air yang aman dapat mengurangi kontaminasi terhadap makanan dan penting untuk mencapai ketahanan pangan.

Hubungan antara kekurangan gizi dan ketahanan pangan bahkan lebih tak terbantahkan. Sejumlah faktor terkait diet dapat berperan, termasuk kurangnya akses atau ketersediaan makanan yang sesuai dan praktik keamanan makanan yang buruk (higiene makanan). Salah satu upaya untuk memperoleh pangan yang aman adalah dengan pengelolaan higiene dan sanitasi makanan dan minuman yang baik dan benar. Higiene dapat dijelaskan sebagai pekerjaan yang sehat dengan menjaga dan melindungi kebersihan subyek (DepKes RI, 2004).

Perhatian terhadap pertanian dan peternakan untuk mendorong swasembada pangan yang baik adalah dua contoh intervensi keamanan pangan yang dapat membantu mencegah risiko dan mengembalikan anak-anak yang kekurangan gizi menjadi sehat. Untuk memerangi kekurangan gizi dan mencapai target global Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) 2025, kita perlu mengadopsi pendekatan multisektoral yang bertujuan untuk meningkatkan sanitasi, kondisi dan akses ke makanan yang memadai untuk semua. Sanitasi ini dapat dicapai dengan menyediakan air bersih untuk pengolahan makanan, menyediakan fasilitas cuci tangan, menyediakan tempat sampah dan instalasi pengolahan air limbah, dll.

2.6 Kebijakan yang sudah ada.

Hingga saat ini, untuk memastikan ketahanan pangan Kota Medan, beberapa regulasi untuk peningkatan ketersediaan jumlah dan peningkatan mutu pangan Pemerintah Kota Medan selama tahun 2016 sampai dengan 2020, Pemda Medan telah mengeluarkan peraturan WaliKota diantara adalah :

1. Perwal No. 15 Tahun 2011 tentang Dewan Ketahanan Pangan Kota Medan,
2. Perwal No. 74 Tahun 2017 tentang Dewan Ketahanan Pangan Kota Medan,
3. Perda No.10 Tahun 2017 tentang pengawasan serta jaminan produk halal dan higienis, Perwal No.89 Tahun 2017 tentang pelaksanaan Perda Kota Medan No. 10 tahun 2017,
4. Perwal No.21 tahun 2011 tentang Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber daya Lokal.

Arah kebijakan utama dalam pembangunan ketahanan pangan adalah sebagai berikut :

- 1) Pembinaan dan penanganan rawan pangan mulai dari tingkat kelurahan hingga ke tingkat rumah tangga/individu.
- 2) Peningkatan sistem pendistribusian dan akses pangan yang efisien serta efektif guna menjamin stabilitas harga, pasokan, dan ketersediaan pangan khususnya pada hari besar keagamaan.
- 3) Diversifikasi panganekaragaman konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang, dan aman (B2SA) berbasis sumber daya pangan lokal.
- 4) Peningkatan koordinasi yang ditempuh melalui koordinasi Dewan Ketahanan Pangan Kota Medan secara lintas sektor.
- 5) Peningkatan kinerja dan pelayanan aparatur secara kreatif, inovatif, responsif, serta profesional.

Strategi dan arah kebijakan tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam masing-masing aspek ketahanan pangan, seperti berikut :

a. Strategi dan Arah Kebijakan Aspek Ketersediaan dan Kerawanan Pangan

- 1) Tersedianya keanekaragaman produksi pangan segar dan pangan olahan serta produksi bahan pangan hewani yang diupayakan melalui optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang ada dengan melaksanakan 4 (empat) usaha pokok yaitu : intensifikasi, ekstensifikasi, diversifikasi dan rehabilitasi dengan dukungan sepenuhnya dari kredit program sehingga ketersediaan bahan pangan dapat terpenuhi.
- 2) Peningkatan keberdayaan masyarakat miskin yang berada dalam kondisi rawan pangan dan kelaparan serta pengembangan jaringan pengamanan ketersediaan bahan pangan bagi kelompok masyarakat gizi kurang dan gizi buruk serta masyarakat rawan pangan transien karena dampak terjadinya musibah atau bencana alam dan sosial.

b. Strategi dan Arah Kebijakan Aspek Distribusi dan Akses Pangan

- 1) Peningkatan efisiensi dan kelancaran distribusi bahan pangan melalui reformasi berbagai peraturan yang menghambat lalu lintas perdagangan, pengembangan sarana dan prasarana distribusi, serta pelayanan teknologi pasca panen.
- 2) Peningkatan kemampuan masyarakat dalam mengakses bahan pangannya dan peran pemerintah kota dalam rangka menstabilkan harga bahan pangan baik antar waktu maupun antar wilayah. c.

c. Strategi dan Arah Kebijakan Aspek Konsumsi, Mutu, dan Keamanan Pangan

- 1) Penurunan konsumsi beras sebagai bahan pangan pokok masyarakat sebesar 1.5 persen per tahun.

- 2) Peningkatan Penganekaragaman konsumsi bahan pangan yang seimbang baik jenis (nabati atau hewani) maupun mutu dan gizi.
- 3) Peningkatan konsumsi bahan pangan sumber pangan lokal yang berbasis pada pangan non beras.
- 4) Peningkatan pembinaan mutu dan keamanan pangan bagi masyarakat.

d. Strategi dan Arah Kebijakan Penguatan Kelembagaan Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan Kota Medan

- 1) Peningkatan koordinasi dan perumusan kebijakan penanganan ketahanan pangan yang ditempuh melalui kegiatan Rapat Koordinasi dalam wadah kelembagaan Dewan Ketahanan Pangan Kota Medan minimal 2 (dua) kali dalam setahun.
- 2) Peningkatan keterpaduan pelaksanaan program dan kegiatan serta mencari solusi pemecahan permasalahan yang dihadapi dilapangan dalam penanganan ketahanan pangan secara lintas sektor dengan melibatkan skpd/instansi terkait dilingkungan Pemko Medan, ditempuh melalui Rapat Posko yang dilaksanakan setiap bulan dalam setahun.

e. Strategi dan Arah Kebijakan Peningkatan kinerja dan pelayanan Aparatur secara kreatif, inovatif, responsif, dan profesional melalui program dan kegiatan

Peningkatan pelayanan Administrasi Perkantoran.

- 1) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
- 2) Peningkatan Disiplin Aparatur
- 3) Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
- 4) Diversifikasi dan Peningkatan Ketahanan Pangan.

Program Realisasi dari misi dilaksanakan melalui program dan dijabarkan dalam kegiatan-kegiatan. Program adalah kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang akan dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat atau melalui partisipasi masyarakat guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan

Sasaran 1. Peningkatan dan Pembinaan Keamanan Pangan Kinerja Laboratorium Dinas Ketahanan Pangan Kota Medan tertuang dalam :

- 1) Surat Keputusan Walikota Medan Nomor : 520/343-K/II/2016 tentang Pembentukan Laboratorium Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar dan Olahan Kota Medan.
- 2) Peraturan Walikota Medan Nomor : 22 Tahun 2019 tentang pembentukan unit Pelaksana Teknis Laboratorium pengujian Mutu dan Keamanan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan Kota Medan

Sasaran 2. Peningkatan Kualitas Konsumsi Pangan Untuk Skor Pola Pangan Harapan (PPH)

berdasarkan Kesimpulan analisis konsumsi masyarakat kota Medan 2020 sebagai berikut :

- 1) Walaupun suasana Pandemi Covid – 19, pola kebiasaan makan masyarakat di Kota Medan relatif sudah memenuhi pola konsumsi B2SA yakni Beragam, Bergizi, Seimbang dan aman dikonsumsi.
- 2) Jumlah makanan yang dikonsumsi responden masih harus terus ditingkatkan khususnya kacang – kacangan, pangan hewani dan sayur serta buah.
- 3) Tingkat kecukupan konsumsi individu / rumah tangga / masyarakat di kota Medan berbeda untuk tiap kecamatan / tidak persis sama.
- 4) Perencanaan program gizi harus diarahkan ke PPH masyarakat yang relatif lebih rendah, kualitas konsumsi harus diutamakan serta pendidikan gizi khususnya untuk kaum ibu Rumah Tangga harus terus ditingkatkan. PPH masyarakat kota Medan tahun 2020 pada suasana pandemi covid 19 adalah 92,29.

Sasaran 3 : Stabilisasi Harga Pangan Pokok Pada Tahun Anggaran 2020, Kegiatan yang dilaksanakan seperti pemantauan harga pangan dengan mengadakan enumerator di 21 kecamatan merupakan kegiatan dengan sumber anggaran dari APBD . Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga, dan Akses Pangan sudah ditampilkan dalam website Dinas Ketahanan Pangan yang bernama “SIKAP”(Sistem Informasi Ketahanan Pangan) data yang ada diambil dengan metode pengambilan data harga dari beberapa pedagang di 10 (sepuluh) pasar yang tersebar di wilayah Kota Medan. Pengambilan data harga dilakukan oleh petugas enumerator yang ditunjuk langsung oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Medan. Adapun pasar yang dijadikan objek pengambilan data harga pangan pokok strategis tahun 2020 adalah Pasar Belawan, Pasar Marelan, Pasar Medan Deli, Pasar Pendidikan, Pasar Sei Sikambing, Pasar Petisah, Pasar Kampung Lalang, Pasar Kemiri, Pusat Pasar dan Pasar Kwala Bekala

Sasaran 4 : Peningkatan Ketersediaan Pangan Kegiatan Pemanfaatan Lahan Pekarangan adalah untuk Mendukung Ketahanan Pangan Keluarga, dalam rangka memberhasilkan program P2KP melalui pemberdayaan masyarakat khususnya kelompok Wanita, untuk mengoptimalkan pemanfaatan lahan pekarangan rumah sebagai sumber dan upaya penganekaragaman pangan dan gizi keluarga melalui budidaya tanaman seperti umbi-umbian, sayuran, buah-buahan, dan budidaya ternak serta ikan sesuai kebutuhan keluarga sebagai sumber ketersediaan karbohidrat, vitamin, mineral, dan protein. Kegiatan ini dilaksanakan melalui sosialisasi, pemberian bantuan sarana/prasarana pertanian, bantuan bibit (ikan, ternak, tanaman pangan), serta bimbingan teknis pembuatan pupuk kompos (dari sisa tanaman, kotoran ternak, dan sisa limbah dapur) melalui pendampingan oleh Penyuluh Pendamping P2KP Kelurahan dan melibatkan unsur skpd terkait dilingkungan Pemerintah Kota Medan.

Sasaran 5 : Antisipasi dan Penanganan Daerah Rawan Pangan Peningkatkan antisipasi dan Penanganan Daerah Rawan Pangan, Dinas Ketahanan Pangan Melakukan Kegiatan Pembinaan dan Penanganan LANSIA Rumah Tangga Rawan Pangan, memberi pembinaan dan penanganan bagi para Lansia rumah tangga rawan pangan dalam rangka diversifikasi dan peningkatan ketahanan pangan rumah tangga serta mengantisipasi terjadinya kurang asupan pangan terhadap Lansia tertanganinya rumah tangga rawan pangan dengan pemberian sarana dan prasarana rumah tangga rawan, Pemberian asupan pangan dan susu bagi LANSIA, Dari kegiatan penanganan Rumah Tangga Rawan Pangan didapati Jumlah Penduduk Rawan Pangan yang tertangani / jumlah penduduk rawan Pangan = $(1257 \text{ jiwa} / 183790 \text{ jiwa}) \times 69 \text{ Laporan Kinerja (LKj)} \times 100\% = 0,68\%$ data ini berasal dari kegiatan dibidang Ketersediaan dan kerawanan Pangan dan Data BPS Kota Medan.

BAB III

REKOMENDASI KEBIJAKAN DAN RENCANA STRATEGIS KETAHANAN PANGAN BERKELANJUTAN

Berdasarkan pertimbangan terhadap situasi ketahanan pangan kota Medan yang telah dianalisis melalui data-data terkait aspek-aspek ketersediaan, keterjangkauan, pemanfaatan dan keberlanjutan pangan, maka direkomendasi beberapa kebijakan strategis yang kemudian dijabarkan dalam bentuk rencana strategis sebagai berikut.

3.1 Ketersediaan Pangan

3.1.1 Optimalisasi Pemberdayaan Sumberdaya

Meskipun angka ketersediaan pangan kota Medan cukup tinggi, akan tetapi pangan kota Medan sangat tergantung pada pasokan dari daerah sekeliling serta pasokan pangan impor. Sementara itu masih terdapat lahan-lahan kurang produktif, lahan pekarangan, lahan terbuka hijau yang dapat dimanfaatkan. Melihat karakteristik kota Medan, maka pertanian kota juga harus didukung baik dengan teknologi bertanam dalam pot juga pertanian hidroponik, seperti rekomendasi berikut.

Rekomendasi: Petakan dan berdayakan semua sumberdaya pertanian secara optimal, termasuk pemanfaatan lahan-lahan tidak produktif, pekarangan dan pertanian kota. Lakukan penyuluhan serta pendampingan pemanfaatan lahan pekarangan, bertanam dalam pot, untuk hidroponik mendukung penyediaan pangan rumah tangga maupun untuk menaikkan pendapatan. Galakkan pertanian organik melalui penyuluhan dan pendampingan; bagi yang membutuhkan berikan pendampingan proses sertifikasi. Dukung pendampingan untuk penjaminan mutu pangan segar asal tumbuhan (PSAT). Dukung pemberdayaan sumberdaya pertanian dengan pemberian bantuan sarana produksi pertanian dan alih teknologi.

Tujuannya adalah peningkatan produksi pangan, yang dilaksanakan melalui program:

1. Peningkatan ketrampilan masyarakat dalam memproduksi pangan.
2. Promosi pertanian perkotaan (*urban farming*).
3. Penerapan penjaminan mutu/sertifikasi PSAT (petani di kota Medan)

3.1.2 Promosi pangan olahan lokal yang sehat dan bervariasi serta menarik

etergantungan pada pangan impor yang tinggi dapat dikurangi dengan menaikkan konsumsi pangan lokal. Disamping itu ditemukan juga bahwa banyak pangan impor yang sesungguhnya dapat diolah

dengan menggunakan bahan baku lokal. Hanya saja pangan lokal harus dibranding dengan baik, diolah dan disajikan lebih higienis serta menarik, khususnya untuk menarik minat kalangan muda milenial. Melihat karakteristik konsumen serta persepsi atas pangan lokal maka direkomendasikan sebagai berikut.

Rekomendasi: Lakukan promosi pangan lokal untuk menggali potensi pangan lokal sekaligus mengurangi ketergantungan pada pangan impor. Lakukan penyuluhan dan pendampingan produksi pangan olahan lokal yang sehat, bermutu, bervariasi dan menarik; termasuk penyuluhan tentang pedoman praktik yang baik (GHP, GMP dan GRP) bagi pelaku industri pengolahan pangan. Dukung promosi pangan lokal dengan mendirikan gerai-gerai khusus untuk pangan olahan lokal, serta kerjasama restoran dan hotel.

Tujuannya adalah untuk meningkatkan promosi pangan lokal kota Medan, yang dilaksanakan melalui program:

1. Produksi pangan lokal higienis, sehat, bervariasi, menarik (milenial).
2. Promosi pangan lokal lewat gerai khusus, restoran dan hotel.
3. Agrowisata pangan

3.2 Keterjangkauan Pangan

3.2.1 Pemberdayaan masyarakat miskin dan rawan pangan

Salah satu penyebab kondisi rawan pangan adalah ketidakmampuan rumah tangga untuk menghasilkan pangan atau ketidakmampuan secara finansial untuk membeli makanan. Hal ini erat kaitannya dengan kemiskinan. Pemerintah lewat bantuan raskin secara langsung dan skim bantuan sosial lainnya ditujukan untuk memampukan masyarakat menjangkau pangan. Untuk efektifitas bantuan, perlu ada data base yang akurat tentang rumah tangga miskin atau layak menerima bantuan. Ketahanan keluarga dan ketahanan pangan yang berkelanjutan dapat juga tercapai lewat program pemberdayaan (pelatihan ketrampilan) untuk menambah pendapatan keluarga. Untuk itu direkomendasikan sebagai berikut.

Rekomendasi: Lakukan dukungan bagi kelompok masyarakat miskin dan rawan pangan melalui penciptaan lapangan pekerjaan, program pemberdayaan, dan pemberian bantuan sosial. Lakukan pemuktahiran DTKS dan pendataan rumah tangga miskin secara partisipatif, serta evaluasi efektivitas bantuan pangan di Kota Medan. Pengembangan kebijakan program bantuan pangan dengan melibatkan pedagang pasar tradisional

Tujuannya adalah mengurangi jumlah masyarakat miskin dan rawan pangan, melalui program:

1. Peningkatan perluasan bantuan pangan yang bersumber dari APBD
2. Menyelenggarakan pemberdayaan ekonomi dan sosial bagi rumah tangga miskin di daerah rawan pangan.

3.2.2 Stabilisasi pasokan dan harga pangan

Pasokan dan harga yang tidak stabil dapat mengakibatkan harga pangan naik sehingga tidak terjangkau rumah tangga. Medan yang pangannya banyak tergantung pada pasokan daerah sekitar perlu melakukan koordinasi antar daerah pemasok untuk memastikan ketersediaan bahan pangan serta menjaga harga dari kondisi yang cenderung naik ketika pasokan berkurang. Jika dibutuhkan pemerintah juga dapat melakukan operasi pasar. Untuk itu direkomendasikan hal-hal berikut.

Rekomendasi: Wujudkan penjaminan harga pangan terjangkau melalui peningkatan koordinasi multi aktor sektor termasuk kerjasama dengan daerah penyangga pangan (*hinterland*) terkait informasi ketersediaan dan distribusi. Lakukan pengendalian harga pangan dan operasi pasar.

Tujuannya adalah adanya jaminan harga pangan terjangkau, yang dilakukan melalui program penjaminan harga pangan

3.2.3 Perbaikan sarana infrastruktur dan prasarana distribusi

Rekomendasi: Dukung pendistribusian pangan melalui perbaikan sarana dan prasarana distribusi pangan.

Tujuannya adalah tercukupinya sarana infrastruktur dan prasarana distribusi melalui program:

1. Perbaikan dan peningkatan sarana infrastruktur jalan yang menghubungkan kota Medan dengan daerah-daerah pemasok pangan ke Kota Medan.
2. Pembangunan cold storage dan fasilitas penyimpanan hasil pertanian.

Fasilitas penyimpanan produk hasil pertanian khususnya yang bersifat perishable dan musiman sudah sangat diperlukan agar dapat menjamin ketersediaan sepanjang waktu, mengurangi bahan segar yang hilang dan terbuang, serta untuk membantu mengendalikan harga produk pangan di pasar.

3.2.4 Wisata Kuliner

Program pemerintahan kota Medan untuk menjadikan Medan sebagai tempat Wisata Kuliner selain perlu didukung, juga dapat dijadikan terobosan untuk pemberdayaan masyarakat dengan menghubungkan petani urban sebagai pemasok bahan pangan ke pelaku industri kuliner.

Rekomendasi: Dukung Wisata Kuliner yang telah ada, serta bangun jaringan kerjasama antara petani urban farming dengan pelaku pusat Wisata Kuliner.

Tujuannya adalah berkembangnya wisata kuliner melalui program pemberdayaan usaha kecil mikro pangan lokal, pemberian skim permodalan dan pengembangan e-market.

3.3 Pemanfaatan Pangan

3.3.1 Kampanye konsumsi pangan B2SA

Untuk mendapatkan manfaat dari ketersediaan pangan yang ada, pangan yang dikonsumsi masyarakat harus bersih, bermutu, sehat dan aman. Keamanan pangan harus dikedepankan, sehingga

penjaminan mutu dan keamanan pangan harus dimulai dari hulu/ladang hingga hilir/konsumsi. Pangan olahan industri kecil dan jajanan anak sekolah (siswa) harus ikut dipastikan tidak menimbulkan efek negatif terhadap konsumen melalui pencegahan dan pengawasan seperti tertuang dalam rekomendasi berikut.

Rekomendasi: Lakukan promosi pentingnya konsumsi Pangan B2SA untuk semua masyarakat, baik produsen, retailer, pelaku industri serta konsumen. Lakukan penyuluhan khusus tentang keamanan pangan terhadap pelaku industri di pusat jajanan, jajanan pinggir jalan, serta penyedia jajanan anak/siswa sekolah (kantin sekolah); serta lakukan pengawasan berkala tentang keamanan pangan (penggunaan BTP, penerapan GHP).

Tujuannya adalah promosi makanan yang bersih, bermutu, sehat dan aman melalui program penyuluhan, pendampingan serta pengawasan.

3.3.2 Penurunan prevalensi stunting

Salah satu indikator penting malnutrisi yang menjadi target nasional maupun global adalah stunting. Usaha-usaha pemerintah harus tetap didukung dan dimaksimalkan untuk menghindari adanya lost generation akibat stunting seperti rekomendasi berikut.

Rekomendasi: Dukung penurunan Prevalensi Stunting melalui penyuluhan kepada IRT, calon pengantin, remaja; serta mengefektifkan intervensi gizi khusus ibu hamil, ibu menyusui, dan baduta. Tujuannya adalah menurunkan prevalensi stunting melalui program kampanye stunting dan intervensi gizi yang menasar calon ibu, ibu hamil dan menyusui, serta anak berusia di bawah dua tahun (baduta).

3.3.3 Kampanye bahaya kegemukan dan obesitas

Asupan gizi yang tidak seimbang di satu sisi menyebabkan malnutrisi, tetapi di sisi lain kelebihan asupan pangan dapat menyebabkan kegemukan hingga obesitas. Kesadaran akan adanya potensi dampak negatif terhadap kesehatan akibat kelebihan berat badan masih belum banyak disadari. Selain gaya hidup, pasokan pangan yang kaya akan garam, gula dan lemak oleh industri pangan lokal maupun pangan ekspor dapat membawa ancaman. Untuk itu rekomendasi berikut menjadi sangat penting.

Rekomendasi: Lakukan kampanye penyadaran tentang bahaya kegemukan dan obesitas, melalui media dan penyuluhan langsung. Lakukan pendataan tentang angka kegemukan dan obesitas.

Tujuannya adalah meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya kegemukan dan obesitas, serta melalui kampanye “gemuk itu tak sehat”.

3.4 Keberlanjutan dan *Cross Cutting Issues*

3.4.1 Pengurangan pangan terbuang dan pemanfaatan pangan tersisa

Rekomendasi 10: Lakukan kampanye pengurangan pangan terbuang dan pemanfaatan pangan tersisa (FLW) dengan melakukan penyuluhan kepada masyarakat serta industri. Dorong pembuatan regulasi kerjasama industri makanan dengan Bank makanan (*food bank*), serta penyediaan sarana pendukung.

Tujuannya adalah untuk mengurangi jumlah pangan hilang dan terbuang (food loss and waste) serta pemanfaatan pangan sisa, yang dilaksanakan melalui program:

1. Kajian dan pendataan FLW
2. Edukasi perilaku terhadap pangan
3. Pemanfaatan FLW
4. Regulasi dan Pendanaan

3.4.2 Kampanye perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)

Rekomendasi: Lanjutkan kampanye Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) melalui penyuluhan tentang pentingnya air (minum) bersih, sanitasi dan praktek higienis (IRT, kelompok PKK, siswa), gerakan kebersihan lingkungan (kelurahan), penyediaan sarana cuci tangan di tempat umum.

Tujuannya adalah mendukung kampanye perilaku hidup bersih dan sehat melalui promosi pentingnya ketersediaan air (minum) yang bersih dan sehat, penerapan sanitasi dan perilaku higienis.

3.4.3 Kampanye industri hijau

Berdasarkan Undang-Undang No 3 tahun 2014 tentang Perindustrian, industri hijau adalah industri yang dalam proses produksinya mengutamakan upaya efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya secara berkelanjutan sehingga mampu menyelaraskan pembangunan Industri dengan kelestarian fungsi lingkungan hidup serta dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Merujuk pada kriteria tersebut kampanye harus dilakukan untuk mendorong industri pangan yang ada saat ini bertransformasi menjadi industri hijau. Selain itu insentif harus diberikan untuk menumbuhkembangkan industri hijau yang dapat mendukung ketahanan pangan.

Rekomendasi: Kampanye disertai pemberian insentif perlu dilakukan untuk menumbuhkembangkan industri pangan proses produksinya mengutamakan upaya efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya secara berkelanjutan.

3.5 Penguatan kelembagaan

Pemerintah RI telah melembagakan Badan Pangan Nasional, akan tetapi hingga saat ini belum jelas pembentukannya. Sementara itu di daerah, termasuk kota Medan, persoalan ketahanan pangan masih ditangani oleh Dinas Ketahanan Pangan. Dinas Ketahanan Pangan bekerja sama dengan unit

kerja terkait aspek ketahanan pangan perlu terkoordinasi dan sinergi untuk menjalankan program pemerintah. Untuk itu direkomendasikan sebagai berikut.

Rekomendasi: Dukung penguatan kelembagaan terkait pangan, baik lembaga pemerintah dan swasta. Tujuannya adalah mendukung kerjasama antar Lembaga dan semua pihak pemangku kepentingan, baik pemerintah, swasta dan organisasi kemasyarakatan. Salah satu yang sedang diinisiasi berdasarkan rekomendasi tersebut adalah adanya Forum Kemitraan Multipihak Pangan Berkelanjutan (FKMPB) Kota Medan.

BAB IV

FORUM KEMITRAAN MULTIPIHAK PANGAN BERKELANJUTAN (FKMPB) KOTA MEDAN “SEBUAH INISIATIF PLATFORM PARTISIPASI PUBLIK DALAM PENYELENGGARAAN PANGAN”

4.1 Latar belakang

Mewujudkan penyelenggaraan pangan secara adil, merata, dan berkelanjutan berdasarkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan tidak saja menjadi tanggungjawab pemerintah namun juga melibatkan peran serta masyarakat. Hal ini tertuang dalam Pasal 130 dan 131 UU RI No 18 Tahun 2012 Tentang Pangan yang menegaskan pentingnya peran masyarakat dalam membantu pemerintah dalam penyelenggaraan pangan. Keterlibatan masyarakat menjadi semakin strategis karena penyelenggaraan pangan di Indonesia menghadapi tantangan yang semakin kompleks yang disebabkan oleh degradasi sumberdaya alam, dampak perubahan iklim, dan terganggunya rantai pasok pangan akibat pembatasan sosial akibat pandemic Covid-19. Permasalahan pangan yang kompleks tersebut perlu ditangani secara lintas sektor (multipihak) baik pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta yang bekerja di sektor pangan.

Kemitraan multi pihak merupakan bentuk kerjasama yang berlandaskan kesepakatan sukarela, saling membutuhkan dan partisipasi aktif dari pemangku kepentingan yang berasal dari berbagai institusi yang memiliki kepentingan langsung dengan sektor yang dikerjasamakan (Bappenas, 2019). Hal ini sejalan dengan prinsip “No Left One Behind” yang memberi ruang bagi pemerintah dan organisasi non pemerintah untuk bekerjasama dalam memastikan seluruh masyarakat mendapat manfaat dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs). Ide kemitraan multipihak ini juga sejalan dengan tagline “Kolaborasi Medan Berkah” yang diusung oleh Pemko Medan Periode 2021-2026.

Pada tanggal 7 Oktober 2021, individu dan perwakilan institusi yang teridentifikasi dalam pemetaan stakeholder menghadiri pelaksanaan Lokakarya Sistem Pangan Berkelanjutan Kota Medan yang diselenggarakan oleh PESADA bekerjasama dengan BAPPEDA Medan dan didukung pendanaan oleh HIVOS. Dalam pertemuan tersebut mendiskusikan isu-isu tantangan dan peluang membangun sistem pangan berkelanjutan dan menginisiasi terbentuknya sebuah forum multipihak di sektor pangan. Salah satu rencana tindak lanjutnya adalah agar mempersiapkan terbentuknya forum multipihak bagi aktor-aktor pangan secara berkesinambungan. Harapannya keterwakilan individu/institusi dalam forum nantinya mesti diperluas menjangkau unsur Organisasi Perangkat

Daerah, pelaku usaha/swasta, dan lain-lain yang memiliki perhatian terhadap sektor pangan di Kota Medan.

Dalam mempersiapkan forum multipihak telah dilakukan pemetaan awal/*initial assessment* stakeholder dan aktor-aktor strategis dalam sektor pangan di Kota Medan. Pemetaan stakeholder dilaksanakan pada September 2021 dengan menggunakan metode wawancara semi terstruktur dan review literatur. Untuk penentuan narasumber menggunakan sampel purposive dengan teknik snowball. Berikut gambaran stakeholder sektor pangan yang teridentifikasi dalam pemetaan awal:

Tabel. Power Vs Interest Grid⁵

Level of interest ↑ High ↓ Low	Subject - Akademisi (Fakultas Pertanian USU, Fak. Pertanian Nomensen, Fak Pertanian UNIKA, Polbangtan) - Kelompok petani (Koptan Serasi Jaya) - Serikat Petani Indonesia - Pelaku usaha pangan: supermarket, distributor - NGO (Sintesa, BITRA, PESADA, Aksata Pangan). - Asosiasi Komunitas Vegetarian	Player - Dinas Ketahanan Pangan - Tim Teknis Dewan Ketahanan Pangan - Dinas Pertanian & Perikanan - BAPPEDA
	Crowd - Media (Tribun Medan, DAAI TV) - Penggerak PKK	Contest Setter - Dinas Ketahanan Pangan & Peternakan Sumut - Dinas Kesehatan Medan - Dinas Perindagkop Medan - DPRD Kota Medan

Low → Level of Power → High

Berangkat dari kebutuhan akan platform partisipasi masyarakat untuk memberikan masukan dalam penyelenggaraan pangan, maka akan dibentuk Forum Kemitraan Multipihak Pangan Berkelanjutan (FKMPB) di Kota Medan. Harapannya forum ini dapat menjadi arena kolaborasi bagi aktor-aktor di sektor pangan untuk berdialog, sumbang saran, sharing pengetahuan dalam mewujudkan penyelenggaraan pangan yang berkelanjutan di Kota Medan. Keberadaan FKMPB Kota

⁵ Keterangan:

- A. **crowd** (lemah dalam power serta interest).
- B. **context setters** (memiliki power akan tetapi hanya memiliki direct interest yang kecil).
- C. **subjek** yaitu stakeholder yang memiliki interest tapi dengan power yang kecil.
- D. **player** yaitu stakeholder yang memiliki power dan interest secara signifikan.

Medan bukanlah untuk menggantikan institusi multipihak yang sudah di Medan tetapi memberi warna bagi penguatan partisipasi masyarakat sipil pada sektor pangan.

4.2 Kelembagaan

FKMPB Medan bertujuan untuk mewujudkan sistem pangan berkelanjutan Kota Medan dengan memfasilitasi dialog multipihak, penelitian, konsultasi, advokasi kebijakan dan penggalangan sumberdaya organisasi. Dalam penyelenggaraan FKMPB akan menginternalisasi prinsip-prinsip berikut ini:

- a. Keberlanjutan; forum berkomitmen mewujudkan visi kedaulatan pangan, sehat, kearifan lokal dan berkeadilan dalam penyelenggaraan sistem pangan.
- b. Independen; kemitraan yang bergerak leluasa, fleksibel, berperan sebagai mitra strategis yang mampu memberikan masukan inovatif bagi pemerintah dan non pemerintah di sektor pangan
- c. Inklusif; bersifat terbuka bagi semua pihak yang berkomitmen mewujudkan pangan berkelanjutan baik unsur pemerintah, non pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat marjinal lainnya yang didasarkan saling percaya dan memberdayakan.
- d. Responsif Gender; kemitraan yang memaksimalkan keterwakilan perempuan dan terintegrasiya perspektif kesetaraan gender dalam kebijakan dan kegiatan yang dilaksanakan oleh forum.
- e. Kemandirian; yang diartikan dapat menghimpun sumberdaya alternatif yang tidak terbatas pada sumber dana tetapi juga pengetahuan, kelompok ahli, dan sebagainya.

Kegiatan yang dilaksanakan:

1. Melaksanakan pertemuan FKMPB minimal 2 kali setahun.
2. Penelitian & Konsultasi
3. Advokasi kebijakan
4. Penggalangan dana

Tim Kerja

Tim Kerja FKMPB Medan terdiri Koordinator dan Anggota yang seluruhnya berjumlah 5 orang (mewakili OPD, sektor swasta, LSM, ORMAS, Akademisi) yang disepakati dalam Pertemuan FKMPB Medan sekali setahun. Tim Kerja bertugas untuk melaksanakan program kerja dan penggalangan dana.

DAFTAR REFERENSI

Buku, Jurnal

Arif, Isdijoso, Fatah, dan Tamyis, Tinjauan Strategis Ketahanan Pangan Dan Gizi Di Indonesia; SMERU, 2021.

Badan Ketahanan Pangan RI, Direktori Perkembangan Konsumsi Pangan, 2021.

Notulensi Pertemuan Forum Multistakholder Pangan Berkelanjutan

Rahmanta & Yusak, Pengaruh Harga Komoditi Pangan Terhadap Inflasi Di Kota Medan; Agrica (Jurnal Agribisnis Sumatera Utara) Vol.13 No.1/April 2020.

Trenggono, Wirman, Sulistiowati, Avianto, Sistem Pangan Berkelanjutan: Makalah Strategi; Switch Asia Program, 2019.

Website

<https://www.republika.co.id/berita/qskm0x383/rni-keterjangkauan-pangan-harus-dimulai-dari-keluarga>

<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220104140228-532-742399/cabai-dan-telur-ayam-buat-medan-inflasi-044-persen-per-desember-2021>

https://kppu.go.id/wp-content/uploads/2021/04/Siaran-Pers-No.-02_KANWILI-PR_IV_2021.pdf

<https://sumut.inews.id/berita/sepanjang-750-km-jalan-provinsi-di-sumut-rusak>

Peraturan

UU RI No 18 Tahun 2012 Tentang Pangan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan periode 2021-2026